

## Diskursus Seputar Tap MPRS No. XXV/ 1996 : Tidak Serious !



*Sulardi*

*Diskursus mengenai pencabutan Tap MPRS No. XXV/1996 harus diikuti dengan membuka cakrawala generasi muda terhadap berbagai ideologi yang ada, sehingga mereka dapat melakukan pemahaman tentang ideologi tersebut tidak dengan cara sembunyi-sembunyi termasuk memahami apa sebenarnya Marxisme, Leninisme, dan Komunisme, sehingga tidak terjadi kesalahan pemahaman atau pemahaman yang terpotong, oleh karena itu perlu perhatian serius dari pemerintah dalam menggagas pencabutan Tap MPRS tersebut.*



*(Para ahli filsafat hanya menafsirkan dunia dengan berbagai cara: akan tetapi persoalan pentingnya adalah bagaimana mengubahnya : Karl Marx Tesis tentang Feuerbach, dalam sebuah lampiran buku berjudul Feuerbach dan Filsafat Jerman oleh: Frederick Engel, Teplok, Juni 2000)*

Akhirnya (Presiden Abdurrahman Wahid) "pasrah" ketika sebagian besar anggota MPR tidak menggubris gagasannya untuk mencabut Tap. MPRS No. XXV/MPRS tahun 1966 tentang larangan penyebaran ajaran komunisme, marxisme dan leninisme. Jelas Presiden tidak puas dengan sebagian besar sikap anggota MPR itu.

Sesungguhnya bangsa ini masih terikat oleh "adiluhung contract" yang di buat oleh leluhur bangsa Indonesia yang menyepakati Pancasila sebagai dasar negara. Oleh sebab itu dalam kehidupan sehari-hari, baik berbangsa, berpolitik, maupun melakukan pergaulan internasional nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tetap dijadikan rambu, sebagai pembatas agar tidak tergelincir pada hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bukan berarti Pancasila ditempatkan sebagai ideologi terbaik dibanding dengan ideologi yang ada. Namun Pancasila harus diyakini sebagai bajubang pas untuk kepribadian bangsa ini. Sehingga mesti di pakai di mana dan situasi apapun. Pancasila juga harus di pandang sebagai ideologi yang dapat membebaskan bangsa ini dari ketergantungan dengan bangsa lain, ketertindasan dan kemiskinan. Di samping itu tentunya Pancasila dapat digunakan sebagai ideologi yang mampu membendung segala hal yang bertentangan dengan Pancasila, termasuk komunisme, leninisme, ataupun marxisme, seperti yang tertuang di dalam ketetapan MPRS No. XXV/1966 tersebut.

Dalam sila pertama Pancasila yang menyatakan bahwa "Ketuhanan Yang Maha Esa", mengandung makna bahwa sebagai bangsa yang beradab, bangsa ini menyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam kehidupan sehari-hari terlihat dalam semangat bertoleransi

terhadap keanekaragaman keyakinan dan agama yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Dengan pemikiran tersebut, sesungguhnya perdebatan yang terjadi menyusul gagasan Presiden Gus Dur untuk mencabut Ketetapan MPRS No. XXV/1966, tentang larangan ajaran komunisme, Marxisme dan Leninisme seharusnya dilakukan secara serius dan mendalam. Dengan harapan semakin memberikan pemahaman yang benar mengenai baik dan buruknya ideologi tersebut. Terus terang saja, sejak berkuasanya rezim Orde Baru diberlakukan secara ketat larangan terhadap buku-buku atau apapun yang menyinggung perihal komunisme, markisme dan leninisme. Sehingga generasi yang lahir di awal enam puluhan, yang praktis ("secara resmi") belum sempat membaca ajaran-ajaran tersebut, padahal mestinya mereka dapat mengetahui dan memahami tentang komunisme, marxisme dan leninisme tidak hanya peristiwa-peristiwa pilu tahun 1945, 1948, 1965. Namun juga mengetahui secara benar muatan yang terkandung dalam "isi" ajaran komunisme, marxisme dan lenin. Sehingga jikapun pada akhirnya tetap tidak di perbolehkan untuk disebar, atau diajarkan di Indonesia menjadi memiliki pemahaman apa yang menjadi sebab musababnya.

**Sesungguhnya bangsa ini masih terikat oleh "adiluhung contract" yang di buat oleh leluhur bangsa Indonesia yang menyepakati Pancasila sebagai dasar negara. Oleh sebab itu dalam kehidupan sehari-hari, baik berbangsa, berpolitik, maupun melakukan pergaulan internasional nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tetap dijadikan rambu, sebagai pembatas agar tidak tergelincir pada hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.**

\* Tulisan ini dikembangkan dari tulisan pendek pada News letter Fakultas Hukum UMM, Edisi Juli - September 2000.



Yang sering dan diajarkan kepada generasi yang lahir di awal Orde Baru berkuasa komunisme yang bertentangan dengan Pancasila titik. Di mana sesungguhnya sebagai sebuah partai politik dalam sejarah Indonesia komunisme telah diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda, kenyataannya partai komunis telah ada pada masa itu, yakni pada kurun waktu tahun 1910-1930 ketika kran untuk mendirikan parpol di buka oleh penguasa Hindia Belanda. Waktu itu dengan nama Patij kumunis Hindia, yang kemudian di bubarkan oleh Belanda setelah melakukan prlawanan pada tahun 1926.

Catatan sejarah Indonesia, pada tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI yang dikenal dengan "Madiun Affair" 1948 dan tragedi nasional pada tahun 1965 yang kemudian dalam sejarah dikenal dengan G 30 S/PKI (?).

Tragedi yang kemudian hari dikenang sebagai pengkhiantan PKI itu menjadi trauma politik rakyat Indonesia. Trauma politik ini yang dikedepankan dan menjadi menjadi dasar yang kuat untuk menolak gagasan untuk mencabut Tap MPRS No. XXV tahun 1966 itu. Sampai disini terlihat dua sudut pandang dalam memahami boleh tidaknya komunisme ada di

**Persoalan yang kemudian muncul mengenai ajaran komunisme dan marxisme adalah, apakah marxisme mampu "mempe-sonakan" masyarakat Indonesia. Sebab, walaupun komunisme sebuah ideologi yang ada awalnya mempunyai daya tarik yang besar, namun akhirnya harus mati bersamaan dengan ajaran keterbukaan Glassnost dan program perestroika**

Indonesia. Perlu dipahami sesungguhnya Tap. MPRS No. XXV/1966 secara faktual tidak efektif, sebab walau Tap. Ini belum dicabut namun ajaran mengenai marxisme sudah banyak ditemukan dalam berbagai buku yang beredar baik melalui internet, maupun di toko-toko secara bebas. Jadi tanpa dicabut pun ajaran yang dilarang dalam ketentuan Tap. Ini sudahndpat di pelajari secara bebas oleh masyarakat.

Persoalan yang kemudian muncul mengenai ajaran komunisme dan marxisme adalah, apakah marxisme mampu "mempe-sonakan" masyarakat Indonesia. Sebab, walaupun komunisme sebuah ideologi yang ada awalnya mempunyai daya tarik yang besar, namun akhirnya harus mati bersamaan dengan ajaran keterbukaan Glassnost dan program perestroika yang direalisasi oleh Mikhail Gorbachev yang mengakibatkan hancurnya Negara Uni Sovyet, sekaligus sebagai pertanda kekalahan komunisme di muka bumi.

Sebagai sebuah ideologi komunisme memerlukan prasarat yang memadai agar dapat diterima di masyarakat. Dalam hal ini komunisme memerlukan adanya kondisi masyarakat miskin dan atua tertindas, karena ajaran komunisme dan juga marxisme menolak penindasan dan kesenjangan serta getol menganjurkan "sama rata sama suka", jelas ini tidak sama dengan semangat ideologi yang lain.

Karena syarat utama adalah kemiskinan dan penindasan, maka dilarang berbagai bentuk aturan pun tidak akan mempan sepanjang kemiskinan dan penindasan masih subur di negara ini. Sebaliknya tanpa dilarangpun bila kesenjangan dan kebebasan serta kemiskinan sudah tidak dikenali, maka tidak mungkin masyarakat tertarik pada ajaran ini.

Oleh sebab hal tersebut di atas, yang harus segera dilakukan oleh bangsa ini adalah bukannya membuat peraturan yang melarang ajaran komunisme dan marxisme, melainkan mencermati kebijakan negara yang memungkinkan terjadinya kesenjangan dan menumbuhkan kemiskinan. Jadi bila negara ini menghendaki agar komunisme tidak tumbuh, pandai-pandailah mensejahterakan rakyat dan jangan menindas rakyat.



**Berkaitan dengan komunisme dan partai komunis, pemerintah hanya bisa mencegah lahirnya kembali Partai Komunis Indonesia (PKI), tetapi pemerintah tidak bisa melarang atau menahan ajaran komunisme dan marxisme berkembang di masyarakat.**

Sepanjang ini, walau ada kebijakan untuk mengentas kemiskinan, namun kebijakan itu sulit mencapai sasaran sebab bersifat "panggung sandiwara", negara ini masih suka menikmati program-program yang ada diabadikan dalam bingkai foto dari pada dilanjutkan hingga berhasil dengan sukses. Artinya kebijakan mengentas kemiskinan dirasa sudah berhasil sesaat acara-acara yang diselenggarakan terpampang di media massa. Inilah problem besar yang ada di negara ini.

Berkaitan dengan komunisme dan partai komunis, pemerintah hanya bisa mencegah lahirnya kembali Partai Komunis Indonesia (PKI), tetapi pemerintah tidak bisa melarang atau menahan ajaran komunisme dan marxisme berkembang di masyarakat. Buku-buku terjemahan maupun hasil tentang Karl Marx, dan Antonio Gramsci, Fredricj Engel dan sebagainya yang sangat marxis kini dapat dengan mudah di peroleh, buku-buku karangan dua tokoh marxis tersebut telah menjadi santapan sehari-hari anak-anak muda yang menolak kemiskinan dan penindasan. Jangan salahkan mereka bila mendewakan ajaran ini ketimbang yang lain.

Sepanjang pejabat negara, masih lebih sibuk memikirkan jabatan apa yang akan diduduki ketimbang mengentas kemiskinan dan membuka lebar kran kebebasan yang demokratis. Dapat dipastikan ajaran Marxisme dan komunisme yang sangat terlihat memukau dan di minati. Oleh sebab itu menjadi tidak mencukupi melarang ajaran komunisme

marxisme dan leninisme hanya dengan sebuah ketetapan MPR. Sebab dengan puluhan bahkan ratusan pun tidak akan mempan, lagi pula musuh komunisme bukan peraturan, melainkan demokratisasi, kebebasan, keadilan dan kemakmuran. Oleh sebab itu bangsa ini harus kembali pada pegangan awal, yakni Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus di jadikan landasan dalam berdemokratisasi dan dalam menegakkan keadilan di segala bidang, bukan sekedar hiasan dinding, dengan sendirinya akan menumbuhkan ketahanan yang kuat untuk membendung -- bukan melarang -- ajaran-ajaran yang bertentangan dengan pancasila. Sehingga tak perlu repot-repot melarang dengan Ketetapan MPR.

Untuk itu, diskursus mengenai pencabutan Tap. MPRS No. XXV/ tahun 1966 harus juga diikuti dengan membuka cakrawala anak-anak muda terhadap berbagai ideologi yang ada. Sehingga ketika mereka mempelajari ajaran yang berhaluan kiri itu, tidak dilakukan dengan cara-cara sembunyi, agar bila ada kesalahan pemahaman mengenai "teks" yang terkandung di dalamnya segera dapat di luruskan.

Demikian pula dengan Pancasila, anak-anak muda jangan lagi diajari dan di cekoki Pancasila dengan metode indoktrinasi, yang menumpulkan nalar tentang sesuatu yang serba harus Pancasila. Lagi pula, sampai Indonesia merdeka selama 55 tahun, Pancasila belum dapat menjelaskan mengapa di negara yang Pancasila ini tidak juga segera mampu mengentas kemiskinan, melakukan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta belum terciptanya masyarakat yang berbudaya Pancasila. Persoalan apakah yang sesungguhnya terjadi di negara yang berideologi Pancasila ini?

Dengan demikian, sesungguhnya yang terkandung di dalam Marxisme, Leninisme dan Komunisme. Dapat dipastikan anak-anak muda menjadi tidak paham jika hanya di beri penjelasan bahwa ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme bertentangan dengan pancasila. Untuk itu diskusikanlah yang serius dan mendalam mengenai ajaran-ajaran kiri ini, tanpa dibarengi dengan perasaan dendam dan nafsu merasa paling benar.